



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8695-8702

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Utara

Yuliana Musin

Universitas Lakidende

Email: yulianamusin1@gmail.com

Abstrak

Urgensi dalam penelitian ini adalah Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Konawe Utara Utara). Peningkatan PAD Kabupaten Konawe Utara Utara selama 5 tahun terakhir tidak lepas dari peran badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Konawe Utara Utara. Tujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Konawe Utara Utara yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe Utara Utara adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem baru yang dilakukan yaitu system keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan dan sistem aplikasi manajemen pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas kerja aparat. Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe Utara Utara harus ada untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan akan menjadi acuan dalam pengembangan pengelolaan pajak. Dan tahapan metode dalam penelitian ini yaitu akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dalam penelitian. Adapun hasil dalam penelitian ini ialah Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Konawe Utara Utara yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe Utara adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem baru yang dilakukan yaitu sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan dan sistem aplikasi manajemen pendapatan daerah untuk meningkatkan

kualitas kerja aparat, kebijakan Pemerintah Pusat melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Utara Utara meliputi prosedur pemungutan dan mekanisme pembayaran yang jelas PBB yang berpotensi besar meningkatkan PAD. Ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan proses pemungutan, intensifikasi yang dilakukan adalah rutin melakukan sosialisasi. Sosialisasi melalui media cetak seperti Koran, membuat dan melakukan penyebaran leaflet/brosur mengenai PBB secara langsung di tempat-tempat pelayanan masyarakat seperti kantor kelurahan, desa, dan kecamatan dengan menggunakan metode door to door, memasang papan himbauan pembayaran pajak di tempat-tempat umum, dan membuat pojok pajak di setiap kelurahan.

Kata Kunci : *Inovasi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract

The urgency in this research is innovation in the management of regional taxes and levies in increasing local revenue (study of the regional tax and levy management body of North Konawe Regency). The increase in PAD for North Konawe Regency over the last 5 years cannot be separated from the role of the regional tax and levy management body for North Konawe Regency. The aim is to find out innovations in managing regional taxes and levies in increasing local original income. The aim of innovation in the management of regional taxes and levies in increasing the original regional income of North Konawe Regency carried out by the regional government in the context of increasing original regional income in North Konawe Regency is strengthening the levy system, which includes improving the service system in the process of collecting regional taxes and regional levies. The new system implemented is a system of information disclosure to the taxpayer community by providing accessible media for ease in the collection process and a regional revenue management application system to improve the quality of work of officials. Based on the description above, it appears that innovation in managing regional taxes and levies in North Konawe Regency must exist to increase local original income and will become a reference in developing tax management. And the method stages in this research are classified, analyzed and interpreted in detail, thoroughly and carefully to obtain more objective conclusions in the research. The results of this research are innovations in the management of regional taxes and levies in increasing the original regional income of North Konawe Regency carried out by the regional government in order to increase original regional income in North Konawe Regency, namely strengthening the levy system, which includes improving the service system in the regional tax collection process. and regional levies. The new system implemented is a system of information disclosure to the taxpayer community by providing media that can be accessed for ease in the collection process and a regional revenue management application system to improve the quality of work of officers, Central Government policy through Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions related to the transfer of Land and Building Tax management from the

central government to the regional government, the intensification carried out by the regional government, in this case the Regional Tax and Levy Management Agency for North Konawe Regency, includes clear collection procedures and payment mechanisms PBB which has great potential to increase PAD. Supported by adequate facilities and infrastructure to carry out the collection process, the intensification carried out is routine outreach. Socialization through print media such as newspapers, making and distributing leaflets/brochures about PBB directly in community service places such as sub-district, village and sub-district offices using the door to door method, installing tax payment appeal boards in public places, and create a tax corner in every sub-district.

Keywords: Innovation, Tax, Original Regional Income.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Kebijakan penggunaan dan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber - sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2022 lalu, tidak memenuhi target. Bahkan PAD yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya terpenuhi 54 persen saja. Dengan kekurangan target sebesar 46 persen. "Target PAD pada tahun 2022 sebesar 74 miliar, dan PAD yang terpenuhi masih jauh dari target, disebabkan berbagai hambatan.

Pengelolaan terhadap pajak dan retribusi daerah yang kurang transparan dalam arti keterbukaan informasi kepada publik sejatinya dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di dalam mengelola keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli daerah. Serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri terhadap PAD. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Utara)".

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Utara ?

METODE PENELITIAN

Proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh (7) yaitu *data collection, data display, data condensation, and conclusions*. Analisis data dimulai pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan dengan transkrip hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi. Analisis Data untuk menemukan Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Utara

a. Keunggulan Relatif (Relative Advantage)

Keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi pengelolaan pajak dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi pengelolaan pajak dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi pengelolaan pajak dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise social, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Sebagai contoh para-adopter akan menilai apakah suatu inovasi pengelolaan pajak itu relative menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang lainnya atau tidak. Untuk adopter yang menerima secara cepat suatu inovasi, akan melihat inovasi itu sebagai sebuah keunggulan.

Keunggulan relatif menjadi tujuan utama dalam melakukan suatu inovasi, Keunggulan yang dimaksud ialah pemberian pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat kepada pihak penerima layanan. Adapun keunggulan penggunaan pengelolaan pajak dengan online dari penjelasan (CIR) Kabupaten Konawe Utara sebagai informan kunci yang dipilih ketika wawancara ialah sebagai berikut :

"Pengelolaan pajak dengan online ini dibuat guna memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak, karena wajib pajak tidak perlu repot-repot

datang ke kantor pajak untuk mengambil SSP dan mengisi secara manual seperti sebelumnya, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan smartphone atau laptop yang terhubung ke jaringan internet, atau bisa juga dengan online yang kami sediakan di kantor di lantai dasar”(Wawancara tanggal 19 Juni 2023)

b. Kesesuaian (Compatibility)

Kesesuaian (compatibility), yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Kesesuaian adalah derajat dimana inovasi pengelolaan pajak tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (compatible). Kesesuaian penggunaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan (HR) yang terpilih terkait kesesuaian dalam inovasi pelayanan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak semakin tahun semakin bertambah dan pegawai tetap segitu dan tidak menggunakan teknologi informasi? tentunya ya kita tidak bisa menolong untuk memberikan pelayanan terbaik, karna kalau pakai hard copy mereka datang satu satu kesini mau berapa lama antri logikanya apakah kita akan menahan orang berlari untuk menunggu orang yang jalan kaki? Ya tidak seperti itu, orang yang jalan kaki harus ikut berlari agar tidak tertinggal itu maksudnya jadi ayolah kita berlari bersama supaya makin cepet dan wp makin puas sama pelayanan kita” (Wawancara tanggal 19 Juni 2023)

c. Kompleksitas (Complexity)

Kompleksitas (complexity), yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Kompleksitas adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya atau sulit dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Tetapi apabila suatu inovasi sulit untuk dipahami dan sulit dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin sulit pula suatu inovasi dapat diadopsi. Karena online merupakan inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang baru dalam pembayaran pajak, sesuatu yang baru tentu memiliki kesulitan bagi beberapa pihak yang kurang

memahami, adapun yang peneliti temui kesulitan yang dihadapi oleh pihak aparat berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan informan (AT) ialah sebagai berikut:

“Pada saat kami memberikan pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak melalui online dengan menggunakan mesin online yang disediakan disini kemarin saya salah input data karna belum terlalu paham seperti apa mekanismenya, jadi sebagai petugas kami bilang harus melakukan pemindah bukuan dan masa tunggu kurang lebih satu bulan baru bisa melakukan pembayaran ulang” (Wawancara tanggal 19 Juni 2023).

Mencermati hasil wawancara diatas penulis menilai bahwa masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh aparat pada saat melakukan entry dokumen perpajakan karena kurangnya pemahaman mekanisme pembayaran sehingga harus melakukan pemindahbukuan dengan masa tunggu kurang lebih satu bulan.

d. Trialabilitas atau Kemampuan Uji Coba

Trialabilitas (trialability), yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Kemampuan untuk diuji cobakan atau trialabilitas adalah derajat dimana suatu inovasi dapat diuji coba dalam batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam pengaturan (setting) sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan (mendemostrasikan) keunggulannya.

Faktor Pendukung Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Faktor pendukung inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah

Mengingat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Utara tidak pernah mencapai target realisasi. Rendahnya pendapatan daerah sangat mempengaruhi perekonomian daerah dan menghambat proses Pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun pemerintah daerah masih ketergantungan dengan pembiayaan dari pusat sehingga kurang inovatif untuk menggali potensi daerah yang dapat di jadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Konawe Utara perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga yang orientasinya untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah di kabupaten Konawe Utara yang maksud dan tujuannya telah dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan kunci CIR yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan sejauh ini cukup optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah terus kami optimalkan dalam proses pemungutan, dan pada tahun 2018 kami membuat kebijakan melalui partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah yang maksud, tujuan, tata cara pengelolaannya tertuang dalam perda tersebut” (Wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan dan sistem aplikasi manajemen pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas kerja aparat, kebijakan Pemerintah Pusat melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Utara Utara meliputi prosedur pemungutan dan mekanisme pembayaran yang jelas PBB yang berpotensi besar meningkatkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Pervaiz K, & Shephard CD. Innovation Management. New Jersey: Pearson Education; 2010.
- Halim A. Akuntansi Keuangan Daerah. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat; 2012.
- Saidi MD. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2011.
- Roertiyah. Strategi Pembelajaran Dalam Organisasi. Yogyakarta: Liberty; 2008.
- Pawiloi AM. Analisis Kontribusi Pajak dan Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar; 2014.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset; 2010.
- Martono N. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2010.
- Hendra Hadiwijaya, F. Febrianty (2019). The Effect of Service Quality and Tax Sanctions on Service Satisfaction. ETIKONOMI is an international journal published by Faculty of Economic and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

